

STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GEN Z 2024 (Studi Kasus Pada KPU Kota Mataram)

Ardiansyah¹, Khaeroniq Zaennurain², Nur Aulia Azril³, Maula Desti Siltania⁴, Bayu Tirta Ifansah⁵, Baiq Aurelia Cantika⁶, Damar Rizki⁷, Edy Kurniawansyah⁸
ardiansyah.syahlan3520@gmail.com¹, zaennurainkhaeroniq@gmail.com²,
nurauliaazril49@gmail.com³, maulasiltania5@gmail.com⁴, ginabayu24@gmail.com⁵,
baiqaureliacantika@gmail.com⁶, adhistyreborn@gmail.com⁷, edykurniawansyah@unram.ac.id⁸
Universitas Mataram

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the strategy for organizing elections carried out by the Mataram KPU in order to increase Gen Z political participation, not only that, the goal is also to determine and evaluate the inhibiting and supporting factors of the Mataram City KPU in increasing Gen Z political participation, especially in organizing elections. This study uses a qualitative method, namely interviews and observations conducted at the Mataram City KPU office with research sources, namely one of the Mataram City KPU officials in the fields of planning, monitoring, and evaluation. Based on the results of interviews with the Mataram City KPU, it was found that the Mataram City KPU tried as hard as possible to increase political participation by implementing three strategies, namely: 1) Conducting socialization through social media, 2) Conducting voter education, and 3) Recruiting Gen Z as KPPS officers. In increasing Gen Z political participation, there are also supporting factors that make it easier for the Mataram City KPU, namely: a) Ease of spreading information through social media, b) Ease of access in the general election process. Not only that, but the city of Mataram also faces inhibiting factors, namely: a) Gen Z's passive attitude, and b) Gen Z's lack of interest in accessing information about politics.

Keywords: Election Implementation Strategy, Gen Z Political Participation 2024.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Mataram dalam rangka meningkatkan partisipasi politik Gen Z, tidak hanya itu tujuannya juga yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana faktor penghambat dan pendukung KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor KPU Kota Mataram dengan narasumber penelitian yaitu salah pejabat KPU Kota Mataram bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kota Mataram didapatkan bahwa KPU Kota Mataram berusaha dengan semaksimal mungkin dalam meningkatkan partisipasi politik dengan menerapkan tiga strategi yaitu: 1) Mengadakan sosialisasi melalui media sosial, 2) Mengadakan pendidikan pemilih, dan 3) Merekrut Gen Z sebagai petugas KPPS. Dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z, juga terdapat faktor pendukung yang menjadi kemudahan bagi KPU Kota Mataram yaitu : a) Kemudahan menyebar informasi melalui media sosial, b) Kemudahan akses dalam proses pemilihan umum. Tidak hanya itu, tapi kota Mataram juga menghadapi faktor penghambat yaitu : a) Sikap pasif Gen Z, dan b) Kurangnya minat Gen Z untuk mengakses informasi mengenai politik.

Kata Kunci: Strategi Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Politik Gen Z 2024.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 1 mendeskripsikan bahwa pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa pemilu adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki tugas nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal meningkatkan partisipasi politik, KPU memiliki tugas dan peran yang sangat penting sesuai dengan pendapat (Halilah, 2022) mengemukakan bahwa KPU memiliki peran dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih mulai dari pemula hingga lanjut usia serta yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusias masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam proses penyelenggaraan pemilu dan Pilkada peran komunikator dan pengelolaan pesan terasa sangat penting. Karena akan menentukan penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU dapat diterima dengan baik atau tidak, sehingga masyarakat berubah sikap untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan setiap warga negara dalam setiap kegiatan-kegiatan politik, Sejalan dengan pendapat (Fathurokhman, 2022) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, baik itu mengikuti partai politik, pemilihan, umum, maupun terlibat dalam keputusan politik. Sedangkan Partisipasi menurut Sastropoetri (1988) dalam bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok, dan mendukung tercapainya tujuan kelompok tersebut serta bertanggung jawab didalamnya. Partisipasi politik tidak hanya ikut terlibat dalam pemilihan umum, tetapi juga keterlibatan warga negara dalam mengkritik, mengambil bagian dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bagian dari partisipasi politik. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan karena akan mempengaruhi bagaimana wajah politik beberapa tahun yang akan datang. Hal ini adalah wujud dari kedaulatan warga negara dalam menentukan bentuk negaranya dan sebagai bentuk implementasi dari Indonesia sebagai negara demokrasi.

Kalangan yang sangat perlu untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik adalah kalangan anak muda. Dalam pemilihan umum, kalangan muda atau pemilih pemula adalah kalangan yang baru pertama kali memilih atau baru berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2008 (4) dalam Bab IV pasal 19 ayat 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih muda atau biasa disebut Gen Z ini perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan politik, baik itu pemilu maupun perbuatan politik lainnya agar nantinya kalangan muda mampu membaca kondisi politik dan bisa merubah setiap kebijakan, regulasi oleh karena keterlibatannya dalam politik.

Kalangan muda lebih khususnya Gen Z yang lahir mulai dari tahun 1997-2012 merupakan kalangan dengan jumlah pemilih yang cukup banyak dibandingkan dengan

generasi yang lain, berdasarkan data nasional bahwa sekitar 40 persen pemilih adalah dari kalangan Gen Z atau sekitar 46.800.161 orang pemilih . Tidak hanya dalam data nasional, di Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh KPU Nusa Tenggara Barat bahwa sebanyak 24,25 persen pemilih dari kalangan Gen Z, atau sebanyak 961.419 orang pemilih. Angka ini merupakan angka yang sangat besar dalam proses pemilihan umum, bahkan dari suara Gen Z saja akan mampu menentukan bagaimana arah politik dan pemerintahan beberapa tahun yang akan datang, dalam hal ini sangat perlu adanya antisipasi dan penanganan dari pihak KPU atau lembaga yang punya wewenang lainnya untuk mengatensi persoalan ini, agar jumlah pemilih yang besar ini bisa menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan potensi tinggi dalam mempengaruhi keikutsertaan Gen Z terhadap partisipasi politik melihat partisipasi politik masyarakat terlebih Gen Z yang sangat kurang, sesuai dengan pendapat (Halilah, 2022) bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka golput yang masih tinggi, hadirnya sosialisasi yang menjadi program KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk apatisisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat. Dalam hal ini KPU harus mampu menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk menarik Gen Z agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik khususnya pemilu. Dalam menentukan strategi yang efektif dan efisien ini, sangat perlu bagi KPU untuk menganalisis karakteristik dan kebiasaan- kebiasaan Gen Z sebagai penunjang dalam penentuan strategi partisipasi politik. Generasi Z atau yang biasa disebut Gen Z adalah orang yang lahir antar tahun 1997-2012, generasi ini biasa disebut generasi internet, karena kehidupannya yang erat dengan kehidupan di media sosial atau media maya, sehingga juga mempengaruhi karakternya, yang segala hal selalu mengandalkan kecanggihan teknologi (Dwi Noviani, 2023).

KPU (Komisi Pemilihan Umum) memegang peran penting terhadap angkat partisipasi politik Gen Z khususnya dalam pemilihan umum, karena ketertarikan Gen Z terhadap politik sangat dipengaruhi oleh bagaimana strategi- strategi maupun upaya - upaya yang dilakukan oleh KPU. Sesuai dengan hasil penelitian (Ulfiyah et al., 2019) tentang keefektifan sosialisasi KPU yang menunjukkan bahwa sosialisasi politik KPU membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Serang. Dari persoalan inilah bahwa penting bagi peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam upaya meningkatkan partisipasi politik Gen Z. Tidak hanya itu, untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU Kota Mataram dalam mengimplementasikan strategi yang ditetapkan. Juga bagaimana bentuk partisipasi Gen Z terhadap politik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Strategi Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z 2024 (Studi Kasus pada KPU Kota Mataram)”. KPU Kota Mataram selalu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi politik Gen Z dengan berbagai media dan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari Gen Z. Namun, sesuai dengan angka Data Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kota Mataram bahwa angka pemilih dengan usia Gen Z sangat besar, tetapi partisipasi Gen Z dalam politik khususnya pemilihan umum sangat kurang, sehingga sangat diperlukan strategi-strategi yang efektif dan efisien dari KPU dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada usaha untuk memahami fenomena atau kasus yang dialami oleh subjek penelitian, dengan melakukan penelitian dengan metode kualitatif peneliti bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan dibantu dengan instrumen-instrumen penelitian Meleong, 2012 dalam (Saputra, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Sejalan dengan pendapat (Swawikanti, 2024) yang mengungkapkan bahwa wawancara adalah sebuah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dari narasumber. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Kota Mataram dan beberapa anak muda khususnya Gen Z sebagai informan penelitian. Penelitian juga menggunakan studi literatur yaitu penelitian terdahulu sebagai penguat penelitian.

Penelitian dilakukan di kantor KPU Kota Mataram pada tanggal 25 November 2024, mengenai strategi yang dikeluarkan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik Gen Z. Penelitian juga dilakukan dengan mewawancarai Gen Z, mengenai keterlibatannya dalam partisipasi politik. Data dan tehnik pengumpulan data diperoleh dengan cara mewawancarai beberapa informan tersebut mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain itu dokumentasi sebagai bukti penunjang dan penelitian. Ada beberapa instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu panduan wawancara agar wawancara yang dilakukan lebih terukur dan tersistem, alat tulis untuk menulis poin penting dalam wawancara, dan alat rekaman yang nantinya akan digunakan untuk merekam hasil wawancara dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang strategi KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z dengan bapak "S" yaitu Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan, Pada Senin, 25 November 2024, menunjukkan bahwa :

"Dalam hal mengatensi banyaknya pemilik pemula atau pemilih Gen Z, kami dari pihak KPU Kota Mataram berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menerapkan strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula atau pemilih Gen ini. Dalam hal ini KPU Kota Mataram mencoba melakukan beberapa strategi yang menurut kami efektif sesuai dengan keadaan yang terjadi sekarang. 1). Mengadakan sosialisasi melalui media sosial. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan media sosial, juga karena melihat latar belakang Gen Z yang sangat dekat dengan media sosial. 2). Mengadakan pendidikan pemilih. Hal yang dilakukan karena banyak masyarakat yang masih minim Tentang informasi-informasi mengenai politik khususnya pemilihan umum. 3). Merekrut Gen Z sebagai petugas KPPS. Langkah ini dilakukan oleh KPU Kota Mataram sebagai bentuk memanfaatkan generasi muda khususnya Gen Z dalam kegiatan-kegiatan politik yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam partisipasi politik.

Demikian juga hasil wawancara peneliti tentang faktor penghambat dan pendukung KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z yaitu dengan dengan bapak "S" yaitu Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan, Pada Senin, 25 November 2024, menunjukkan bahwa :

"Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat kami sebagai pihak KPU Kota Mataram, faktor pendukung yang dihadapi yaitu, 1). Kemudahan menyebar informasi melalui media sosial. Hal ini karena berbagai

sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU bisa disebar secara mudah dan luas melalui media sosial. 2). Kemudahan akses dalam pemilihan umum. Faktor pendukung ini karena kemudahan akses dalam pemilihan umum Seperti bisa mendaftar melalui online dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan partisipasi politik. Di samping faktor pendukung KPU Kota Mataram juga memperoleh hal-hal penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik yaitu, 1. Sikap pasif Gen Z. Hal ini menjadi faktor penghambat karena sikap Gen Z yang cenderung tidak peduli dengan kehidupan sosial. 2). Kurangnya minat Gen Z dalam mengakses informasi mengenai politik.”

Untuk meningkatkan partisipasi politik Gen Z dan dalam upaya menyikapi persoalan masih kurangnya keikutsertaan Gen Z dalam kegiatan-kegiatan politik khususnya pemilihan umum, KPU Kota Mataram mengeluarkan strategi yang cukup maksimal. Namun, dari strategi yang dilakukan juga masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak KPU. Tetapi berdasarkan keterangan yang diberikan, pihak KPU Kota Mataram selalu berupaya untuk memaksimalkan strategi-strategi yang dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) di Nusa Tenggara Barat dari 3.964.325 orang pemilih tetap, sebanyak 60 persen pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z. Tidak hanya dalam skala di Nusa Tenggara Barat (NTB), KPU Kota Mataram telah menetapkan jumlah DPT yaitu sebanyak 315.549 orang pemilih dan sebagian besar pemilih adalah dari kalangan milenial dan Gen Z. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Mataram, mengungkapkan bahwa “sebanyak 5.000 orang sudah ditetapkan sebagai DPT Kota Mataram sebagai pemilih pemula atau Gen Z yang berumur 17 tahun dari Februari hingga 27 November”. Dari banyak pemilih pemula ini, KPU Kota Mataram selalu berupaya untuk membuat pemilih pemula ini secara aktif dan maksimal berpartisipasi pada pemilu mendatang. Persoalan yang selalu diatensi oleh KPU Kota Mataram selalu membuat inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula atau Gen Z sebagai kelompok pemilih yang cukup besar di Kota Mataram.

Strategi KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z

a. Mengadakan Sosialisasi Melalui Media Sosial

Dalam hal menanggapi banyaknya DPT dari kalangan milenial dan Gen Z tersebut KPU berupaya untuk mengeluarkan dan menetapkan strategi-strategi yang memungkinkan agar partisipasi politik Gen Z semakin meningkat, sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh Gen Z yang kehidupannya sangat erat dengan internet, media sosial dan media Maya, KPU Kota Mataram berupaya untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi politik melalui media sosial resmi KPU Kota Mataram, dalam hal ini KPU Kota Mataram mempergunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube sebagai penyaluran program-program seperti podcast ataupun obrolan-obrolan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Strategi ini merupakan strategi utama KPU dalam menarik minat dan partisipasi Gen Z sebagai generasi yang eksis terhadap media sosial. Hal ini didukung oleh pendapat (Dwiyanti et al., 2023) bahwa media sosial mengubah lanskap partisipasi politik warga negara dengan sangat signifikan, karena media sosial memberi akses yang sangat luas dan cepat terhadap informasi dan berita tentang politik

b. Mengadakan Pendidikan Pemilih.

KPU Kota Mataram selalu berusaha menerapkan strategi-strategi yang maksimal dalam mengikutsertakan anak muda dalam pemilihan umum, tidak hanya dalam hal media sosial KPU Kota Mataram juga menerapkan strategi yaitu dengan melaksanakan pendidikan pemilih bagi milenial dan Gen Z untuk meningkatkan kesadaran politik mereka. Sesuai dengan pendapat (Diazaki & Mubarak, 2024)

bahwa pendidikan pemilih merupakan suatu tugas atau strategi yang krusial yang harus dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang juga menjadi amanat peraturan perundang-undangan yaitu UU No. tahun 2017. Hal ini dilakukan oleh KPU karena rentannya terjadi konflik, dan rawan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum. Tujuan diberikannya pendidikan pemilih ini diharapkan anak muda lebih khususnya Gen Z memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian untuk tidak terjadinya konflik dan pelanggaranpelanggaran dalam pemilihan umum. Strategi ini termotivasi dari strategi yang dikeluarkan oleh KPU NTB yang mengadakan pendidikan pemilih kepada 375 orang generasi milenial dan Gen Z di 15 desa di NTB, khususnya desa-desa yang rawan terjadinya kecurangan dan konflik.

Konsep pelaksanaan pendidikan pemilih KPU bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, membangun kesadaran hak dan kewajiban sebagai pemilih serta memperkuat pemahaman proses demokrasi dan pemilihan. Program ini ditujukan bagi pemilih pemula, masyarakat belum pernah memilih, kelompok rentan dan komunitas pemuda/mahasiswa. Metode pelaksanaannya meliputi pendidikan politik, pelatihan pemilih, penyebaran informasi melalui media sosial dan kerjasama dengan sekolah/universitas serta organisasi masyarakat sipil. Materi pendidikan mencakup proses pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, cara memilih tepat serta analisis kritikal kampanye dan program partai.

c. Merekrut Gen Z sebagai petugas KPPS

Tidak hanya pada sesuatu yang sifatnya teori, tetapi KPU Kota Mataram juga menerapkan strategi yang sifatnya kontekstual yaitu dengan mengikutsertakan Gen Z dalam penyelenggaraan pemilu yaitu direkrutnya Gen Z sebanyak mungkin oleh KPU sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Strategi ini diterapkan oleh KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda, yang nantinya mereka secara tidak langsung ikut serta dalam melakukan pencoblosan, serta berpartisipasi dan terlibat dengan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Strategi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z karena mereka dengan sendirinya dan bahkan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih sebagai warga negara untuk perbaikan daerah beberapa tahun yang akan datang.

Faktor pendukung dan penghambat KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik Gen

Faktor Pendukung

a. Kemudahan menyebar informasi melalui media sosial

Dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z, KPU Kota Mataram juga memiliki faktor pendukung yaitu kemudahan menyebar informasi melalui media sosial. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, kemudahan dalam mendapat informasi juga mengalami perkembangan yang pesat, termasuk dalam mendapatkan informasi politik. Media sosial menjadi salah satu hasil dari berkembangnya teknologi. Hadirnya media sosial bisa semakin mempermudah akses informasi bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula karena mampu dijangkau hampir seluruh lapisan masyarakat secara tidak terbatas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Putra & Nurcholis, 2021) menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setuju bahwa media sosial dapat mempermudah informasi dari pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan angka yang mencapai 98,3% atau 59 responden yang menjawab “ya”, artinya hanya ada 1,7% atau 1 responden yang tidak setuju bahwa media sosial mampu memudahkan mereka dalam memperoleh informasi

dari pasangan calon yang berkontestasi.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa media sosial dengan signifikan mampu memudahkan para pemilih pemula dalam memperoleh informasi mengenai informasi politik. Dengan kemudahan informasi yang didapat, bisa mengatasi angka pemilih golput kedepannya, khususnya para pemilih pemula yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produksi pengetahuan politiknya masih kurang. Namun dengan tersebarnya informasi terkait pasangan calon dan informasi politik lainnya di media sosial, pemilih pemula juga tetap harus bijak dalam mengamati informasi yang didapat karena tidak semua informasi yang ada di media sosial benar adanya (Rizki Putra & Nurcholis, 2021).

b. Kemudahan akses dalam proses pemilihan umum (pemilu).

Faktor pendukung KPU dalam meningkatkan partisipasi politik melalui kemudahan dalam proses pemilihan umum adalah peningkatan akses informasi yang jelas dan mudah diakses tentang proses pemilihan, syarat dan ketentuan serta hak-hak pemilih. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem pemilihan yang efektif, efisien dan transparan. KPU juga menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi dan pemilihan.

KPU menyediakan sistem pendaftaran pemilih yang mudah, cepat dan transparan. Sistem ini memungkinkan masyarakat khususnya Gen Z untuk mendaftar secara online maupun offline dengan prosedur yang sederhana dan jelas. KPU juga menyediakan fasilitas pendaftaran di berbagai lokasi, seperti kantor KPU, pusat layanan publik dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk memudahkan proses pendaftaran, KPU menyediakan formulir pendaftaran yang sederhana dan mudah diisi. Formulir tersebut dapat diakses secara online atau diperoleh secara langsung di lokasi pendaftaran. Selain itu, petugas KPU juga siap membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.

Faktor Penghambat

a. Sikap Pasif dari Gen Z

Tantangan ini menjadi tantangan yang cukup berat yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z, hal ini sesuai dengan pendapat (Saluan et al., 2023) bahwa anak muda yang tidak mau terbuka dan tidak memiliki inisiatif terhadap persoalan sekitar terutama dalam mengimplementasikan negara demokrasi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh KPU. Melihat sikap yang dimiliki oleh Gen Z cenderung tidak mau berbaur dengan kegiatan sosial dan lebih condong pada kepentingan-kepentingan yang individual. Ketidakpekaan Gen Z terhadap persoalan-persoalan sosial menjadi satu tantangan karena semangat itu akan tumbuh jikalau lahir dari motivasi internal Gen Z itu sendiri. sikap individu ini bertolak belakang dengan fungsi anak muda lebih khususnya mahasiswa sebagai agen kontrol kehidupan bermasyarakat, bahwa fungsi tersebut akan berjalan dengan maksimal bilamana seseorang ikut serta dan berbaur dalam masyarakat, sikap apatis, individual, berdiam diri dengan kenyamanan yang ada (rebahan) merupakan penyakit yang dimiliki oleh Gen Z yang semestinya perlu dihilangkan, dan sekaligus menjadi tantangan besar bagi KPU dalam menangani persoalan partisipasi politik anak muda.

b. Kurangnya Minat Gen Z untuk Mengakses Informasi Mengenai Politik

Masalah kurangnya minat Gen Z dalam mencari tahu dan mengakses informasi mengenai mengenai politik juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kota Mataram. Mengapa demikian, karena salah satu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z adalah melalui media sosial. Tujuan dari strategi ini yaitu

untuk menyebarluaskan informasi mengenai politik dibalut dengan video-video menarik juga berupa podcast, tapi masalah baru yang muncul adalah kurangnya minat anak muda untuk mengakses hal-hal tersebut. KPU Kota Mataram mengungkapkan bahwa hal ini juga menjadi tantangan dalam penyebaran informasi politik melalui media sosial, tetapi KPU Kota Mataram akan selalu berinovasi dan berbenah mengenai strategi-strategi yang diupayakan dalam hal meningkatkan partisipasi politik Gen Z.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting Generasi Z (Gen Z) dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pemilu di Kota Mataram, mengingat jumlah mereka yang signifikan sebagai kelompok pemilih. Namun, rendahnya tingkat partisipasi politik Gen Z menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan keterlibatan mereka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram telah menerapkan berbagai strategi, seperti memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi, memberikan pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman mereka, serta merekrut Gen Z sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, KPU menghadapi sejumlah kendala, termasuk sikap pasif Gen Z yang lebih fokus pada kepentingan individu dan kurang berinteraksi dengan masyarakat, serta rendahnya minat mereka dalam mengakses informasi politik, meski sudah disampaikan melalui platform digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan inovatif yang sesuai dengan karakteristik Gen Z untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Dengan strategi yang tepat dan usaha berkelanjutan dalam mengatasi hambatan, Gen Z diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, G. (n.d.). Partisipasi Gen Z dalam Politik. Fakultas Hukum Unis. <https://fh.unis.ac.id/node/123>
- Anugerah, W. (n.d.). Apa Itu KPU? Pengertian, Tugas, dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum. Localstartupfest. <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-kpu/>
- Aspara, D. (2023). Mengenal Komisi Pemilihan Umum: Pengertian, Tugas, sampai Wewenang. BeritaSatu. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1041946/mengenal-komisi-pemilihan-umum-pengertian-tugas-sampai-wewenang>
- Diazaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.139>
- Dwi Noviani, dkk. (2023). Sosialisasi Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Remaja Millennial Generasi Z di Era Society 5.0. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 119. <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/208/149>
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 298–306. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/34>
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>
- Halilah. (2022). 470-Article Text-778-1-10-20230106. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(Desember), 78–93. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470>
- Hapsari, H. R., & Budiman, Y. N. (n.d.). Kesadaran Politik Gen Z Melalui Partisipasi Ruang Digital yang Demokratis. Yoursay.Id. <https://yoursay.suara.com/kolom/2024/11/13/104610/kesadaran-politik-gen-z-melalui->

- partisipasi-ruang-digital-yang-demokratis
- Herman, S., Malik, I., & Sari, riska. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(4), 1372–1383.
- Maulina, A. T. (2023). Apa Saja Tugas dan Kewenangan KPU? Ini Penjelasan Lengkapnya. *Nasional*. <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/20/337/2750215/apa-saja-tugas-dan-kewenangan-kpu-ini-penjelasan-lengkapnya>
- Rizki Putra, T., & Nurcholis, A. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi pada Mahasiswa FISIPOL UGM. *Jurnal PolGov*, 2(1), 193–222. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i1.1372>
- Saluan, F., Egeten, M., & Tulung, T. (2023). Evaluasi Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Sam Ratulangi Politics Review ...*, 1(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/srpolrev/article/view/49527%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/srpolrev/article/download/49527/43252>
- Saputra, B. (2014). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Saprahan DI Desa Puska Kecamatan Tebas. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–11.
- Swawikanti, K. (2024). Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya | Bahasa Indonesia Kelas 8. *Ruang Guru*. <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>
- Ulfiah, Damanhuri, & Rahman, I. N. (2019). Pengaruh Efektivitas Metode Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 10–27.